

## **Perspektif Petani tentang Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari**

**Muhammad Dini Alfarizi<sup>1\*</sup>, Mikhael<sup>1</sup>, Triman Tapi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Jurusan Pertanian, Politeknik Pembangunan  
Pertanian Manokwari

Email: [algarizi1922@gmail.com](mailto:algarizi1922@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Setiap desa memiliki potensi yang dapat dimaksimalkan untuk pembangunan ekonomi lokal. Kemudian potensi ini didukung melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif petani terhadap BUMDes Mulya Bersama di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 48 informan yang terdiri dari petani, pengelola, dan pendamping BUMDes. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes membantu usaha tani, khususnya dalam penyediaan penggilingan padi dan transportasi. Namun, tidak semua petani memanfaatkannya karena kurangnya informasi dan loyalitas pada penyedia lain. Pada sisi pemasaran, petani mengapresiasi kemudahan akses, tetapi mengeluhkan keterlambatan pembayaran dan penetapan harga yang tidak partisipatif. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan sarana produksi lebih tinggi dibandingkan dengan pelayanan pemasaran. Kesimpulannya, BUMDes memiliki potensi memperkuat ekonomi lokal, tetapi perlu pembenahan kelembagaan dan tata kelola. Disarankan dilakukan sosialisasi menyeluruh, evaluasi transparan, serta penguatan modal usaha untuk menjamin keberlanjutan BUMDes.

Kata kunci: Perspektif, Usaha tani, Petani, BUMDes

---

### *Abstract*

*Every village possesses inherent potential that can be optimized to support local economic development. This potential is reinforced through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes). This study aims to examine farmers' perspectives on BUMDes Mulya Bersama in Prafi Mulya Village, Prafi District, Manokwari Regency. A qualitative approach was employed, using purposive sampling to select 48 informants, consisting of farmers, BUMDes managers, and facilitators. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings reveal that BUMDes has supported agricultural activities, particularly by providing rice milling and transportation services. However, not all farmers utilized these services due to limited information and continued loyalty to other service providers. In terms of marketing, farmers appreciated the ease of access but expressed dissatisfaction with delayed payments and the non-participatory pricing mechanism. Overall, farmers' satisfaction with the provision of production facilities was higher than with marketing services. In conclusion, BUMDes holds significant potential to enhance the local economy but requires improvements in institutional structure and governance. It is recommended that comprehensive outreach be conducted, transparent evaluations implemented, and business capital strengthened to ensure the sustainability of BUMDes operations.*

*Keywords: Perspektif, Usaha tani, Petani, BUMDes*

---

## PENDAHULUAN

Distrik merupakan unit pemerintahan yang berperan sebagai bagian dari wilayah administratif di tingkat kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, distrik memiliki peran penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Omet (2023), disebutkan bahwa kepala distrik bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan dana kampung, termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung. Kocu & Roychansyah (2021) menyebutkan mengkaji penataan administrasi pemerintahan kampung di Distrik Obaa, dan menyoroti pentingnya pengelolaan administrasi yang baik untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di tingkat distrik. Dengan demikian, distrik tidak hanya berperan sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

Desa identik dengan wilayah di luar perkotaan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Pasalnya, desa memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan bangunan sehingga memungkinkan warganya untuk melakukan kegiatan usaha tani. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal, mempunyai batas wilayah tertentu, serta identik dengan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus pemerintahan masyarakatnya sendiri (Rauf & Maulidiah, 2015).

Setiap desa tentunya mempunyai potensi yang berbeda-beda, seperti letak, topografi, iklim dan cuaca di wilayah tersebut serta kondisi umum lainnya. Untuk memaksimalkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Dikutip dari Suhandi (2023), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beragam jenis usaha yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi ganda sosial dan komersial, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga berkomitmen memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan menyediakan layanan dan produk yang relevan dengan situasi lokal. Salah satunya dalam menyediakan sarana produksi usaha tani, sebagai upaya penunjang ekonomi petani di pedesaan. Aji, (2020) mengatakan, kekurangan sarana dan prasarana pada BUMDes dapat menghambat jalannya kegiatan usaha serta mengganggu kualitas pelayanan kepada pelanggan. BUMDes memegang peran penting dalam

mendukung usaha tani, baik di hulu maupun hilir, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Martoyo dan Darmawan (2020) dalam Sri Wilujeung (2023), menyatakan bahwa BUMDes berfungsi sebagai penghubung yang membantu petani dalam memperoleh sarana produksi pertanian.

Pertanian pedesaan merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial di daerah terpencil. Petani pedesaan memanfaatkan lahan untuk memproduksi pangan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Dalam usaha tani tentunya memerlukan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung kelangsungan usaha tani.

Kampung Prafi Mulya merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian. Hal ini didukung dengan luas lahan pertanian 288 ha. Selain itu, masyarakat yang ada di Kampung Prafi Mulya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Selanjutnya potensi ini didukung dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Mulya Bersama yang berdiri sejak tahun 2020 dan berfokus sebagai distributor penyerap hasil produksi (beras) sebanyak 40-43 ton per bulan. Kemudian BUMDes Mulya Bersama juga menyediakan pelayanan sarana produksi berupa penggilingan padi dan kendaraan angkut. Meskipun potensi besar yang ada di Kampung Prafi Mulya didukung dengan adanya pelayanan penyediaan pemasaran, namun hanya 13,37 % petani yang menjual berasnya ke BUMDes Mulya bersama. Hal ini mengakibatkan BUMDes kesulitan memenuhi target bulanan sesuai kontrak pemerintah daerah sehingga membeli beras dari luar kampung bahkan hingga Pulau Jawa dan Sulawesi. Dari uraian diatas maka dianggap perlunya dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam bagaimana perspektif petani tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama yang ada di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Strauss and Corbin (1990) dalam Sulistyawati (2023), tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi dalam mengungkap permasalahan yang terjadi. Sehingga pendekatan ini sesuai untuk menggambarkan perspektif petani terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama di Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* karena mempertimbangkan adanya BUMDes aktif yang bergerak sebagai distributor penyerap hasil produksi (beras) dari petani.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi terhadap 48 informan yang terdiri dari 41 petani sebagai informan pelaku dan 7 orang dari unsur pengelola dan pendamping BUMDes sebagai informan pengamat. Pemilihan informan pelaku menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria, petani yang berinteraksi dengan BUMDes Mulya Bersama.

Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik, penggunaan bahan referensi berupa rekaman wawancara, serta *member checking* dengan informan. Uji reliabilitas dilakukan melalui audit oleh dosen pembimbing terhadap seluruh proses penelitian.

Analisis data dilakukan melalui model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga memanfaatkan alat seperti handphone, laptop, printer, serta bahan berupa kertas HVS dan map untuk mendukung proses penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelayanan Sarana Produksi oleh BUMDes

Pelayanan penyediaan sarana produksi oleh BUMDes Mulya Bersama di Kampung Prafi Mulya merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, terutama dalam pengolahan hasil panen dan transportasi. BUMDes menyediakan unit penggilingan padi serta kendaraan angkut seperti truk dan pick-up. Namun, dari 41 petani yang diwawancarai, hanya 23 yang pernah memanfaatkan layanan ini. Sisanya tidak mengetahui detail fasilitas atau lebih memilih menggunakan layanan swasta karena sudah memiliki jaringan sendiri.

BUMDes memiliki dua mesin penggilingan, yaitu satu unit Jiangdong yang sudah rusak dan satu unit Yanmar baru yang masih berfungsi dengan kapasitas hingga tiga ton gabah per hari. Walau sebagian petani menilai kualitas gilingannya baik, ada juga yang meragukannya karena masalah kebersihan dan keutuhan beras. Terbatasnya jumlah mesin juga menyebabkan antrean panjang saat panen raya, yang menjadi keluhan utama petani.

Akses terhadap layanan cukup mudah, hanya dengan menghubungi pengurus BUMDes. Sistem biayanya pun ringan melalui sistem bagi hasil 10:1, tanpa pembayaran tunai. Namun, sosialisasi layanan masih kurang sehingga informasi di kalangan petani terbatas. Layanan transportasi diberikan secara gratis untuk mengangkut beras ke gudang. Meskipun 18 petani merasa puas dan 6 cukup puas, masih ada keluhan terkait kerusakan mesin, antrean, dan kurangnya sosialisasi.

### **Pelayanan Pemasaran Hasil Pertanian**

Pelayanan BUMDes Mulya Bersama dalam pemasaran hasil pertanian, khususnya beras, merupakan langkah strategis menuju kemandirian ekonomi desa. Meskipun distribusi dan logistik berjalan cukup baik, mekanisme penetapan harga dan sistem pembayaran masih menjadi sumber utama ketidakpuasan petani. Harga beli ditetapkan Rp13.000/kg, sedangkan harga jual ke Pemerintah Daerah Papua Barat adalah Rp14.000/kg, dengan selisih Rp1.000/kg digunakan untuk operasional. Namun, proses penetapan harga dilakukan secara internal tanpa melibatkan petani.

Ketidakterlibatan petani dalam penetapan harga menimbulkan persepsi bahwa BUMDes kurang transparan. Petani berharap adanya forum partisipatif dalam penentuan harga agar mencerminkan kepentingan bersama. Banyak petani merasa harga beli BUMDes tidak menutupi biaya produksi, sehingga sebagian lebih memilih menjual ke tengkulak yang menawarkan harga lebih tinggi, antara Rp13.500–Rp15.000/kg, dan dibayar secara tunai.

Dari sisi aksesibilitas, BUMDes memiliki keunggulan lokasi strategis dan sistem operasional yang fleksibel, memungkinkan truk menjemput hasil panen langsung ke petani. Ini sangat membantu petani tanpa kendaraan pribadi. Namun, masalah utama adalah keterlambatan pembayaran. Beberapa petani menerima pembayaran dalam waktu 2–3 hari, sementara lainnya harus menunggu hingga satu bulan, karena BUMDes tergantung pada pencairan dana dari pemerintah daerah.

Tingkat kepuasan petani mencerminkan kompleksitas permasalahan yang ada. Sebanyak 12 petani merasa puas, 21 cukup puas, dan 8 tidak puas. Kritik paling banyak terkait harga yang tidak kompetitif dan pembayaran yang lambat. Sebagai solusi, petani menyarankan agar BUMDes memperluas jaringan pasar ke sektor swasta atau koperasi, serta membuka forum komunikasi rutin untuk menampung dan menanggapi aspirasi petani secara terbuka.

### **Perspektif Petani Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perspektif petani terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mulya Bersama di Kampung Prafi Mulya, ditemukan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan secara umum keberadaan BUMDes diterima dengan baik oleh petani.

*“Ya kita mudahnya kayak gini, kita jual ke bumdes nanti sudah digiling disini juga di belakang rumah. Nanti ditampung disini, nanti mobil bumdes yang ambil sendiri entah di tampung di gudang atau langsung disetorkan. Kalau untuk petani ini sudah*

*termasuk di permudahlah. Kalau mobil yang ngambil dari petani itu sudah tanggungannya bumdes jadi petani ngak bayar lagi". (HH, Kampung Prafi Mulya 09-03-2025)*

Temuan ini berdasarkan analisis yang sejalan dengan hasil penelitian Mirnawati *et al.* (2016), yang menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan penyediaan sarana produksi ditentukan oleh ketersediaan, harga yang kompetitif, dan kemudahan akses. Kelancaran usaha tani di Kampung Prafi Mulya didukung dengan ketersediaan sarana produksi oleh BUMDes. Selain itu, kemudahan petani saat mengakses sarana produksi, seperti lokasi yang strategis dan bisa berkordinasi via telepon berkontribusi terhadap kepuasan petani. Dalam hasil penelitian tersebut, harga yang kompetitif membantu petani memperoleh saprodi tanpa meningkatkan beban biaya produksi mereka. Temuan penelitian Mirnawati juga menunjukkan perbedaan dengan temuan di lapangan yaitu pelayanan sarana produksi (penggilingan padi) oleh BUMDes bukan sistem harga melainkan sistem bagi hasil. Walaupun demikian, petani tidak menyalahkan sistem tersebut karena dianggap sama dengan penyedia layanan di luar BUMDes Mulya Bersama.

Walaupun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan sarana produksi oleh petani masih belum merata.

*"Setahu saya BUMDes itu punya gilingan padi saja. Kalau angkutan ada itu satu unit truk warna merah besar baknya agak tinggi". (HO, Kampung Prafi Mulya, 11-03-2025)*

*"BUMDes itu ada truk angkutan dapat dari bantuan pemerintah. Kalau gilingannya itu cari sendiri. Sementara BUMDes ini belum punya gilingan, masih pakai gilingan swasta". (WO, Kampung Prafi Mulya, 17-03-2025)*

*"Setahu saya hanya ada truk satu, biasanya dipakai untuk angkat beras" (SO, Kampung Prafi Mulya, 17-03-2025)*

Hal ini disebabkan karena pengadaan sarana produksi yang ada di BUMDes Mulya Bersama diadakan secara bertahap. Dari hasil yang telah dipaparkan, maka analisa kondisi temuan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada petani terkait fasilitas yang tersedia dapat mengatasi ketimpangan dalam pemanfaatan sarana produksi yang terjadi akibat pengadaan bertahap dan kurangnya informasi. Selain itu, loyalitas petani terhadap penyedia layanan di luar BUMDes menjadi hambatan tersendiri yang berakar pada faktor sosial dan psikologis. Mengacu pada Hamali (2018), perspektif dan keputusan individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta pola interaksi yang telah terbentuk sebelumnya. Oleh karena itu, tanpa upaya membangun kepercayaan dan komunikasi yang intensif, BUMDes akan sulit mengalihkan pilihan petani dari penyedia lama ke layanan yang mereka tawarkan. Dengan kata lain, pemerataan pelayanan hanya

bisa dicapai apabila BUMDes mampu menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi sosial masyarakat petani setempat melalui strategi komunikasi yang efektif.

Temuan berikutnya yang mencuat dalam penelitian adalah minimnya transparansi dalam pengelolaan BUMDes. Petani menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam evaluasi kegiatan usaha.

*“Sebenarnya kurang puas karena kurangnya transparansi kita kan ingin tahu mana sih hasil dari BUMDes ini. Kan gak kelihatan. Mungkin bangunan apa atau kegiatan apa begitu”. (MAR, Kampung Prafi Mulya, 10-04-2025)*

*“Tidak puas. Biasanya kelompok yang seperti itu tidak lama karna modelnya itu tidak transparan”. (WO, Kampung Prafi Mulya, 11-03-2025)*

Kondisi ini bertentangan dengan teori kelembagaan, sebagaimana dijelaskan oleh North (1990), bahwa efisiensi institusi desa sangat bergantung pada norma dan aturan main yang disepakati bersama. Dalam konteks BUMDes sebagai lembaga desa, seharusnya ada mekanisme pelaporan terbuka dan musyawarah desa sebagai forum evaluasi dan pertanggungjawaban. Selain itu, Uphoff (1986) mengartikan kelembagaan sebagai peraturan yang berlaku untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab. Dalam hal ini petani memiliki hak untuk dilibatkan dalam evaluasi kegiatan oleh BUMDes. Kurangnya transparansi ini berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Mulya Bersama, dan dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada keberlanjutan usaha. Kemudian analisis ini sejalan dengan hasil penelitian Yuanita & Tristiarini (2024), bahwa keberlanjutan usaha sangat dipengaruhi oleh transparansi. Penelitian ini juga menunjukkan peningkatan profitabilitas unit usaha ketika mempublikasi laporan yang berkelanjutan. Dengan demikian, jika BUMDes Mulya Bersama dapat meningkatkan sistem pengelolaan menjadi lebih transparan maka dapat menjamin pandangan positif petani dan berpengaruh pada keberlanjutan BUMDes Mulya Bersama.

Masalah lain yang juga cukup krusial adalah keterlambatan sistem pembayaran hasil panen yang dibeli oleh BUMDes Mulya Bersama. Beberapa petani mengeluhkan pembayaran dilakukan hingga dua minggu hingga satu bulan setelah beras diserahkan.

*“Barang dibawa dulu nanti uang baru menyusul begitu, kalau maunya petani itu kan gak begitu. Jual beli itu ada barang ada uang itu nanti bayarnya menyusul. Ya memang sempat dulu saya dikasih uang muka dulu. Paling cepat itu semingguan. Artinya saya belum pernah jual langsung dibayar”. (WO, Kampung Prafi Mulya, 11-03-2025)*

*“Paling lama satu bulan paling cepat dua minggu”. (MAR, Kampung Prafi Mulya, 10-04-2025)*

Kondisi ini menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan operasional dan konsumsi rumah tangga, terutama saat musim panen. Hal ini, dapat dijelaskan dari hasil



penelitian Lastinawati et al. (2016) yang menyatakan keputusan petani untuk menjual hasil panennya ke tengkulak karena adanya pinjaman modal dan pembayaran yang langsung *cash*.

Mekanisme penetapan harga yang tidak melibatkan petani juga menjadi perhatian. Harga seringkali ditentukan sepihak oleh pengurus BUMDes tanpa adanya kesepakatan terbuka dengan petani.

*Penetapan harga dari bumdes itu kita dengar dari orang-oranglah akhirnya semua orang dengar artinya saling nyambung". (PO, Kampung Prafi Mulya, 17-03-2025)*  
*"Kalau penetapan dengan harga dari pemerintah itu pengurus-pengurus itu. Nah penetapan itu petani ngak diikutkan, padahal kalau diikutkan. Maksudnya bagaimana ya kan bumdes ini untuk desa bukan untuk perorangan". (MN, Kampung Prafi Mulya, 15-03-2025)*

Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipatif dalam kelembagaan desa. Dalam teori kelembagaan menurut Ostrom (1986), keberhasilan lembaga lokal seperti BUMDes sangat ditentukan oleh keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika petani tidak dilibatkan, maka harga yang ditetapkan berpotensi dianggap tidak sesuai dengan biaya produksi petani. Dalam penelitian Fathi (2024), juga dijelaskan bahwa harga jual akan mempengaruhi pendapatan petani baik untung maupun rugi. Jika demikian maka harga jual yang tidak sesuai harapan petani dapat menurunkan minat petani untuk menjual beras ke BUMDes.

Kepuasan terhadap pelayanan penyediaan pemasaran hasil produksi berbanding terbalik dengan kepuasan terhadap pelayanan sarana produksi.

*"Harapannya bumdes ada terus supaya tengkulak tidak semena-mena. Jadi nanti kalau bumdes itu modalnya sudah cukup bisa di kasih modal dulu untuk tanam. Jadi nanti hasil panennya itu semua dijual ke bumdes. Karna sekarang ini kitakan ambil bukan di bumdes saja. Karna bumdes pas ngak ada jadi kita ambil di tengkulak juga nah hasil panennya juga kita bagi"(HU, Kampung Prafi Mulya 13-03-2025).*  
*Ya itu tadi dibilang puas ya puas dibilang tidak puas ya iya juga. Terus saran saya itu untuk BUMDes bisa lebih terbuka lagi sama petani, harga belinya disesuaikan coba kalau belinya sama dengan harga pasaran dari luar ya saya pasti jual ke sana kan begitu.. Kalau soal tepat pembayaran saya bisa maklumi karna kan alasannya tunggu dari pemerintah daerah."(SO, Kampung Prafi Mulya 15-03-2025).*

Petani informan memberikan sejumlah saran yang membangun agar pelayanan BUMDes Mulya Bersama lebih optimal dan berpihak pada kepentingan petani. Petani mengharapkan agar BUMDes dapat menyesuaikan harga beli beras sehingga lebih kompetitif dengan harga pasar luar, guna menarik minat petani untuk menjual berasnya ke BUMDes. Selain itu, sistem pembayaran juga perlu diperbaiki agar lebih cepat dan fleksibel. Petani juga berharap BUMDes lebih terbuka dalam menyampaikan laporan



keuangan, sistem pembagian hasil, dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, petani mendorong BUMDes untuk mengembangkan pasar penjualan yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada kontrak dengan ASN atau pemerintah daerah. Di samping itu, petani informan juga berharap agar BUMDes Mulya Bersama senantiasa hadir sebagai penstabil harga beras.

Meskipun demikian, BUMDes Mulya Bersama memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal di Kampung Prafi Mulya. Namun, untuk mewujudkan peran tersebut secara optimal, diperlukan perbaikan pada aspek pemerataan layanan, transparansi kelembagaan, sistem pembayaran, dan pelibatan petani dalam penetapan harga. Sebagaimana ditegaskan oleh Yana et al. (2023), keberhasilan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh fungsi ekonominya, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dalam mengelola konflik, membangun partisipasi, dan menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat. Dengan memperkuat tata kelola dan memperluas partisipasi masyarakat, BUMDes tidak hanya akan meningkatkan efisiensi usaha tani tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keberlanjutan usaha desa secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan BUMDes Mulya Bersama dalam penyediaan sarana produksi memberikan dampak positif bagi petani di Kampung Prafi Mulya, terutama dalam mempermudah akses terhadap alat penggilingan padi dan kendaraan angkut. Layanan ini dinilai sesuai dengan kebutuhan petani, meskipun belum dimanfaatkan secara merata karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan informasi, serta masih adanya loyalitas petani terhadap penyedia layanan lain. Sementara itu, pelayanan dalam pemasaran hasil produksi juga telah dijalankan, namun menghadapi tantangan seperti keterlambatan pembayaran, penetapan harga tanpa melibatkan petani, dan rendahnya transparansi pengelolaan BUMDes yang berdampak pada kepercayaan petani. Oleh karena itu, disarankan adanya sosialisasi berkelanjutan mengenai layanan BUMDes, evaluasi kelembagaan yang menekankan prinsip partisipatif dan transparansi, serta penguatan modal usaha untuk mengatasi masalah pembayaran hasil panen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. N. A. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Wana Tirta Mukti Dalam Peningkatan Ekonomi Desa Di Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Fathi, F. A. (2024). Hubungan Biaya Produksi , Harga Jual Dan Etos Kerja Islam Dengan Pendapatan Petani Padi Dengan Daya Produksi Sebagai Variabel Mediasi. *Journal Of Economics Research And Policy Studies*, 4(3), 663–678.
- Hamali, S. (2018). Agama Dalam Perspektif Sosiologis. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2), 86–105. <https://doi.org/10.24042/Ajsla.V12i2.2111>
- Kocu, H., & Roychansyah, M. S. (2021). Perkembangan Klaster Perguruan Tinggi Di Distrik Abepura Kota Jayapura. *Prosiding Seminar*, 53–60.
- Lastinawati, E., Asmaga, W., Pusvita, E., Lestari, W., Ayu, P., Rosmawati, H., Purwadi, Septianita, & Putri, P. (2016). Determinan Keputusan Petani Kopi Menjual Ke Tengkulak Di Desa Sinar Marga Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan. *Jurnal Agrifo • Vol. 10 • No. 1 • April 2025*, 10(1), 1–23.
- Mirawati, Molo, M., & Suminah. (2016). Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Lembaga Penyedia Saprodi Dengan Preferensi Dan Kepuasan Pelanggan. *Agritexts: Journal Of Agricultural Extension*, 40(2), 98–113.
- North, D. . (1990). *Institutions, Institutional Change And Economic*. Cambridge University Press, New York.
- Omet, M. (2023). Peran Kepala Distrik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Selatan. *Wahana Bina Pemerintahan*, 5(2), 1–14.
- Ostrom, E. (1986). An Agenda For The Study Of Institutions. *Public Choice*, 48(1), 3–25. <https://doi.org/10.1007/Bf00239556>
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa* (1st Ed.). Zanava Publishing.
- Sri Wilujeung. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Banjar Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3624–3634.
- Suhandi, R. (2023). *Jenis Usaha Yang Bisa Dijalankan Bumdes*. Pemerintah Pekon Blitarejo.
- Sulistiyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit K-Media.
- Uphoff, N. T. (1986). *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press. West Hartford. Usa.
- Yana, N., Baruwadi, M. H., & Imran, S. (2023). Peran Bumdes Dalam Manajemen Agribisnis Padi Sawah Di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. *Journal Of Management & Business*, 6(2), 494–506.

Yuanita, K., & Tristiarini, N. (2024). Analisis Corporate Governance, Profitabilitas, Struktur Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 5(2), 185–198. <https://doi.org/10.31949/jaksi.v5i2.9743>.